Implikasi Penetapan Hutan Laposo Niniconang Watangsoppeng Terhadap Perlindungan Hak Rakyat Atas Tanah

Muhammad Badai Anugrah^{1*}, Farida Pattitingi¹, Sri Susyanti Nur¹

¹ Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email Correspondensi: muhammadbadaianugrah@gmail.com

No. Handphone Correspondensi: (+62) 811-504-2001

Artikel info

Artikel history:

Received; 05-09-2021

Revised; 20-10-2021

Accepted; 22-10-2021

Abstrak. Penetapan kawasan hutan laposo niniconang menyebabkan konflik agraria antara masyarakat dan Pemerintah selama bertahun-tahun. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hak atas tanah karena masyarakat yang tinggal di kawasan hutan kehilangan sumber penghidupan yang telah dikelola secara turun-temurun. Atas dasar persoalan tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar hukum masyarakat melakukan penguasaan tanah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian yuridis empiris. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, menggunakan hasil wawancara untuk diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan masyarakat meyakinkan bahwa tanah yang mereka kuasai adalah hak milik masyarakat setempat. Akan tetapi, banyaknya petani yang ditangkap membuat kekhawatiran untuk mengelola lahan tersebut. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini maka disimpulkan bahwa kebijakan reforma agraria yang komprehensif dibutuhkan untuk penyelesaian konflik-konflik semacam ini.

Abstract. The determination of the forest area of laposo niniconang caused agrarian conflicts between the community and the government for years. This creates uncertainty over land rights because people living in forest areas lose their livelihood sources that have been managed for generations. On the basis of these problems, research was conducted which aims to find out the legal basis for the community to control land. The approach taken in this research is an empirical juridical study. This article research uses empirical juridical research methods, using the results of interviews to be processed and analyzed using a legal approach. The results of the study indicate that the land tenure by the community ensures that the land they control is the property of the local community. However, the large number of farmers who were arrested made it a concern to manage the land. Therefore, through this research, it is concluded that a comprehensive agrarian reform policy is needed to resolve such conflicts.

Keywords:

*Hak Atas Tanah;
Konflik Agraria;
Hak Pengelolaan
Hutan;
Masyarakat
Tradisional;*

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Penguasaan atas kekayaan alam, bumi dan air oleh Negara dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut UU Kehutanan dalam Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan pada Pasal 36 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana ketentuan 2 menjelaskan ketentuan Pasal 18 diubah sehingga menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, danf atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

Dominasi diskursus bahwa peraturan adalah alat pemaksa yang dapat mengarahkan perilaku masyarakat telah menghasilkan berbagai dampak negatif sangat besar. Dalam hal ini, pengawasan yang lemah bukan harus dijawab dengan cara menguatkan pengawasan, namun yang justru perlu dipertanyakan adalah mengapa diperlukan pengawasan. Disamping itu, persoalan-persoalan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kehutanan hampir pasti tidak digunakan sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, kedua aspek itu hanya diserahkan oleh kebenaran administrasi yang dalam pelaksanaannya justru menjadi hambatan terbentuknya kelembagaan maupun tata kelola pemerintahan kehutanan yang efisien.(Kartodihardjo, 2013)

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.(Supriadi, 2014) Hutan sebagai sumber daya alam memiliki arti dan nilai strategis. Nilai strategis hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan berbagai berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ekologi, sosial dan manfaat ekonomi merupakan tiga pilar manfaat yang dapat diperoleh dari hutan. Nilai strategis hutan dapat pula didefinisikan dalam artian ekonomis, sebagai masukan sumber daya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.(Safiuddin, 2018) (Supriadi, 2014)

Terlepas dari keberhasilan pemanfaatan hutan, dilain sisi pemanfaatan hutan menyisakan sisi yang buram. Ketimpangan penguasaan ruang dan pengelolaan atas sumber agraria masih begitu nyata, pembenahan tata kelola

sumber sumber agraria belum terjadi dan upaya pemulihan krisis lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat jalan ditempat, meskipun regulasinya telah dibuat. Dalam konteks situasi agraria Sulawesi Selatan yang memiliki 3033 desa/kelurahan, ada 1028 desa diklaim masuk dalam kawasan hutan. Sementara pembagian ruang tersebut sebagai berikut: konsesi kehutanan seluas 2.726.796 Ha, sektor pertambangan 655.086,66 Ha, pada sektor Perkebunan 160.420 Ha dan untuk pembangunan infrastruktur mencapai 43.511,11 Ha dari luas daratan Sulawesi Selatan sekitar 4.576.453 Ha dengan ruang tersisa 991.638, 23 Ha. (Kpai.go.id, 2020) Jika melihat peruntukan ruang Sulawesi Selatan, 60% ruangnya merupakan kawasan hutan, sementara Rumah Tangga Petani untuk selanjutnya disebut RTP gurem di Sulawesi Selatan sekitar 338.108 dari total 950.241 RTP, artinya terdapat 35% RTP yang penguasaan lahannya dibawah 1.000 m². Jika diurai lagi maka akan memperlihatkan bahwa 1 RTP menguasai lahan garapan hanya 0,57 Ha saja atau di bawah 1 ha. (Kpai.go.id, 2020)

Penetapan Kawasan Hutan tertuang dalam SK.434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan seluas ± 2.725.796 Ha. Pada tahun 2019, Kementerian Kehutanan kembali melakukan peruntukan fungsi Kawasan Hutan dan kawasan non hutan menjadi kawasan Hutan di berbagai daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam SK: 362/Menlhk/setjen PLA.0/05/2019. Penunjukan tersebut dilakukan tidak untuk mengembalikan hak atas tanah yang dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat. Catatan KPA Sulsel, sepanjang tahun 2015-2019, sekitar 50 petani yang dikriminalisasi oleh negara yang menempatkan mereka sebagai pelaku tindak kejahatan. (Anugrah, 2019) Situasi ini memperlihatkan bagaimana ketimpangan penguasaan dan tata kelola agraria yang jauh dari rasa keadilan. (Anugrah, 2020)

Penangkapan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi pada 22 Oktober 2017 lalu, terhadap tiga orang petani masing-masing bernama Sahidin, Jamadi dan Sukardi. Penangkapan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5356/Men.Hut-UII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Laposo Niniconang sebagai hutan konservasi. Penangkapan terhadap petani kembali terulang oleh Kepolisian Resort Soppeng bersama petugas KPH Wallanae pada awal Maret 2020, petani tersebut masing-masing bernama Sabang, Natu, dan Ario Permadi yang merupakan warga Ale Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata. Bermula pada Februari 2020, Natu menebang pohon miliknya yang merupakan warisan dari bapaknya untuk keperluan membuat rumah untuk Ario. Menariknya, muncullah pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah status hak atas tanah yang dikuasai turun-temurun oleh masyarakat di Kawasan Hutan Konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng, untuk menjawab tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa status hak atas tanah yang dikuasai turun-temurun pada kawasan hutan konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng.

METODE

Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu tipe penelitian hukum yang menggunakan pendekatan dengan studi lapangan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam

pertanyaan penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara dan yang menjadi narasumber adalah Masyarakat Kampung Coppoliang, Desa Umpungen, Kabupaten Soppeng yang ditangkap karena kasus pidana kehutanan dan Masyarakat Kampung Ale Sewo, Kelurahan Bila, Kabupaten Soppeng yang ditangkap karena kasus Pidana Kehutanan.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun populasi dan sampel yang akan dihimpun pada penelitian ini ialah menggunakan teknik sampling secara bertujuan (*purposive sampling*) yakni teknik pengambilan sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya sebagai berikut : 1) Keterangan Masyarakat Kampung Coppoliang, Desa Umpungen, Kabupaten Soppeng, akan diambil 1 responden yang ditangkap atas pidana kehutanan pada Kawasan Hutan Konservasi Laposo Niniconang untuk menjelaskan sejarah penguasaan tanah, 2) Keterangan Masyarakat Kampung Ale Sewo, Kelurahan Bila di Kabupaten Soppeng, akan diambil 1 responden yang ditangkap atas pidana kehutanan pada Kawasan Hutan Konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng untuk menjelaskan sejarah penguasaan tanah. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Status Hak Atas Tanah Yang dikuasai Turun-Temurun oleh Masyarakat

1. Sejarah Konflik Agraria Struktural

Konflik kawasan hutan didefinisikan sebagai pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang memiliki hak terhadap akses suatu wilayah kawasan hutan dan pihak yang bertentangan tersebut berupaya untuk menghilangkan klaim pihak lain. Sejarah konflik kawasan hutan Laposo Niniconang yang ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan R.I. Nomor 5356/Men.Hut-UII/KUH/2014 seluas kawasan hutan 46.132 Ha yang terbagi atas Taman Wisata dengan luas 1.318 Ha, Hutan Lindung dengan luas 33.349 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 11.465 Ha.(BPKH, 2020) Sumber konflik adalah lahan yang berada pada kawasan hutan tersebut dan penyebab konflik adalah perbedaan kepentingan masyarakat yang berada pada kawasan hutan dan Pemerintah terhadap kawasan hutan. Masyarakat membutuhkan tanah pada kawasan hutan untuk berkebun demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara Pemerintah menjadikan lahan hutan sebagai tegakan pohon yang berfungsi untuk ekonomi dan ekologi.

Oleh sebab itu, Pemerintah membatasi akses masyarakat terhadap kebun yang dikelola secara turun-temurun pada kawasan hutan dengan membuat aturan untuk membatasinya serta melakukan penjagaan pada areal kawasan hutan. Keberadaan masyarakat yang telah bermukim sebelum Indonesia merdeka tidak dilibatkan dalam proses penetapan kawasan hutan.(Wicaksono & Malik, 2018)

Kawasan hutan Laposo Niniconang berada di empat kecamatan, yaitu Marioriwawo, Lalabata, Donri-Donri dan Liliriaja. Secara keseluruhan kawasan hutan di Kabupaten Soppeng berdasarkan pada SK: 362/Menlhk/setjen PLA.0/05/ 2019 seluas 137.041,94 Ha yang di antaranya terbagi atas beberapa fungsi kawasan hutan sebagai berikut: Kawasan Konservasi seluas 4.116,48 Ha, Hutan

Lindung seluas 28.016,65 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 4.875,82 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas 5.634,38 Ha, Areal Penggunaan Lain seluas 94.398,70 Ha.(BPKH, 2020) Relasi kuasa yang menjadi penyebab konflik kepentingan kawasan hutan antara lain adalah pertentangan hak atas tanah, perampasan akses atas tanah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kewenangan sentral dalam pengelolaan kawasan hutan dan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.

2. Faktor Penyebab Konflik Agraria

Penyebab Konflik kehutanan di kawasan Hutan Laposo Niniconang dimana Pemerintah menilai bahwa sumber konflik terjadi karena kerusakan pada fungsi hutan, sedangkan masyarakat yang berada pada kawasan hutan menjelaskan bahwa sumber dari konflik tersebut adalah hilangnya mata pencaharian karena jika mengelola kebun pada kawasan hutan dapat diancam dengan pidana.

Peraturan Menteri LHK Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Genetik. Dalam Permen tersebut, Pemerintah merespon isu penting pada kawasan hutan konservasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat dalam tata kelola kawasan konservasi, yaitu: pertama, memberikan jaminan akses kelola kepada masyarakat hukum adat di dalam kawasan konservasi yang inklusif. Dan kedua, kriminalisasi masyarakat adat dalam kawasan hutan. Permen tersebut memposisikan masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pengelolaan kawasan hutan. (Wicaksono & Malik, 2018)

Pada Tahun 2017 lalu Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi menangkap tiga orang petani masing-masing bernama Sahidin, Jamadi dan Sukardi. Ketiga petani tersebut didakwa telah melakukan pengrusakan hutan sebagaimana diatur dalam UU P3H. Padahal faktanya mereka telah hidup secara turun-temurun dan menggantungkan hidup di Kampung Coppoliang sebelum ada penetapan kawasan hutan Laposo Niniconang, Kabupaten Watangsoppeng 2014.(Anugrah, 2019)

Berdasarkan wawancara dengan Sukardi,(Wawancara, 2021) menjelaskan bahwa pada saat itu, ia sedang berkebun bersama keluarganya yakni menanam jahe dan melakukan penebangan karena pohon tersebut menghalangi tanaman jahe yang akan di tanam dan sebagian pohon kayu di jadikan papan untuk membuat rumah kebun dan pagar kebun, sebagian sebagai bahan kayu bakar pembuatan gula aren. Kebun yang di kelola merupakan warisan dari orang tuanya terdahulu sejak dari orang tuanya lahir sampai mereka juga di lahirkan di kampung Coppoliang.

Pada Maret 2020, Natu, Ario dan Sabang di tangkap, mereka ditangkap karena menebang pohon miliknya sendiri yang merupakan ditanam oleh bapaknya sekitar tahun 1980 di kebunnya. Ketiganya merupakan petani yang tinggal di kampung Ale Sewo dan didakwa dengan UU P3H. Pada Februari 2020, pohon jati tersebut diolah menjadi 4 lembar balok tiang, 70 lembar pasak kayu, 9 lembar papan kayu dan 122 balok untuk membuat rumah.(Anugrah, 2019)

Ketiga petani tersebut, menanam jahe dan lengkuas di tanah yang dikuasai keluarga ntu secara turun – temurun dengan luas ± 26 are untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bersama keluarga. Di kebunnya pula, terdapat puluhan pohon jati yang berumur puluhan bahkan ratusan tahun yang ditanam oleh leluhurnya sendiri, pohon jati dipergunakan untuk kebutuhan papan dalam membangun rumah. Kebun tersebut merupakan warisan dari orang tua Ntu yang telah meninggal puluhan tahun lalu dan menghidupi 6 orang anaknya serta 10 orang cucu.(Anugrah, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, Ntu tidak mengetahui bahwa kebun miliknya yang telah dikuasai dan dikelola turun-temurun masuk di dalam kawasan hutan.(Wawancara, 2021) Lebih lanjut, Ntu menerangkan sebelumnya tidak pernah menerima teguran dari aparat kepolisian atau keluaran karena mengelola kebun tersebut karena setiap tahunnya Ntu membayar PBB dari tahun 1997 sampai sekarang. Pada Pasal 1 angka 6 UU P3H dengan jelas menyatakan bahwa Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Ketentuan di atas kembali ditegaskan dalam Pasal 11 UU P3H yang menyatakan bahwa Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Aturan-aturan yang dibentuk sejak awal menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi untuk tujuan komersil atau bisnis,(Triansyah et al., 2020) dalam penjelasannya secara umum bahwa tindak pidana kehutanan yang dimaksudkan dalam UU P3H dilakukan oleh sindikasi kehutanan, dimana aturan sebelumnya dinilai masih belum mampu mengatasi kejahatan kehutanan yang berlangsung sistematis. Subjek hukum dari UU P3H adalah kejahatan yang terorganisasi dan pembalak liar yang memiliki koneksi dengan sindikat kejahatan, pelaku kejahatan lintas negara dan bukan ditujukan kepada pelaku yang tidak terorganisir maupun tidak terlibat dalam sindikasi. Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat untuk diperlakukan khusus demi tercapainya rasa keadilan terdapat dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 memutuskan bahwa Pasal 50 ayat (3) huruf e dan i “dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”. Menindaklanjuti putusan MK tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.2/Menlhk/Setjen/Kum.4/2/2016 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya adalah

mensosialisasikan putusan MK 95/2014 terkait pengecualian pemidanaan bagi petani dan masyarakat adat atas kegiatan “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” dan “menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang”. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat pada umumnya, dan khususnya masyarakat yang tinggal disekitar hutan, maka didalam pengelolannya harus dilaksanakan secara professional.(Wahanisa, 2015)

Petani yang berdomisili ditepian hutan, memandang bahwa secara tradisional yang ada di kawasan hutan itu merupakan sumber penghidupan, cadangan perluasan tanah garapan dan sekaligus sebagai daerah foodsecurity. Bagi penduduk lokal, gangguan ekologi yang datang dari luar hutan akan mengancam kehidupan sosial dan ekonomi mereka.(Permadi, 2016)

Ketidakpastian dalam penguasaan kawasan hutan dapat menghambat efektivitas pengelolaan hutan. Disatu sisi sistem penguasaan yang diatur oleh hukum negara sangat lemah dalam operasionalnya, sementara sistem yang diatur secara tradisional tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang mendapat dukungan secara hukum. Hal ini mempengaruhi kepastian hak atas lahan tersebut. Konflik penguasaan tanah muncul dari persepsi dan interpretasi yang berbeda yang dimiliki antar pihak terhadap hak mereka atas tanah dan sumber daya hutan.(Sylviani & Hakim, 2014)

Masyarakat di Kawasan Hutan Laposo Niniconang telah hidup secara turun temurun sejak sebelum Indonesia merdeka dan menggantungkan hidup di kawasan Hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukardi dan Natu yang menjelaskan bahwa sosialisasi tentang batas dan kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan tidak ada. Kurangnya partisipasi masyarakat secara langsung sehingga kesadaran mengenai pelestarian kawasan hutan tidak efektif. Kelestarian kawasan hutan dan kehidupan masyarakat yang menggaungkan hidupnya pada hutan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, kawasan hutan sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat. Begitu pula kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya hutan karena masyarakat memanfaatkan lahan tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Keterlibatan aktif masyarakat untuk berpartisipasi mengelola kawasan hutan dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan.

Kearifan lokal merupakan kearifan lingkungan dalam bentuk tata nilai atau perilaku hidup dalam bermasyarakat disuatu tempat atau daerah, baik antar sesama masyarakat maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka. Pengetahuan adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam ataupun gaib.(Situmorang & Simanjuntak, 2015)

Penanganan konflik kawasan hutan Laposo Niniconang jika melihat

rentetan peristiwa penangkapan masyarakat yang berupaya tetap mengelola tanahnya merupakan pembiaran konflik tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan peran Pemerintah untuk mengajak masyarakat berdiskusi sehingga menemui solusi dalam permasalahan tersebut. Jika dibiarkan, penangkapan tersebut akan selalu terulang disebabkan masyarakat mempertahankan tanah yang dikelola secara turun-temurun. Pendekatan represif penegak hukum dan diskriminasi melalui pendekatan yuridis yang tidak berpihak kepada masyarakat merupakan faktor penyebab konflik kehutanan terus terjadi. Hal tersebut seharusnya menjadi dasar Pemerintah dalam mengevaluasi keterlibatan aparat penegak hukum di wilayah kehutanan.

Konflik agraria di kawasan hutan Laposo Niniconang akibat tidak adanya kejelasan terkait tata batas wilayah kawasan hutan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Kehutanan yang memberi kewenangan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menunjuk kawasan hutan. Di lapangan, penetapan kawasan hutan tumpang tindih dengan permukiman masyarakat, tanah yang di kelola secara turun-temurun dan fasilitas sosial dan umum yang ada di kampung. Oleh sebab itu, masyarakat desa ini rawan mengalami penggusuran, penangkapan dan pengusiran paksa dengan dalih berada pada kawasan hutan. Proses penunjukkan tersebut harusnya diawali dengan inventarisir desa-desa dengan melihat penguasaan tanah di lapangan serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi.

Desa Umpungeng berada di kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan jumlah penduduk sekitar 3067 Jiwa yang tersebar di enam dusun yang diantaranya dusun Jolle, dusun Liangeng, dusun bulu batu, dusun Umpungeng, dusun Awo dan dusun Waessuru. Wilayah yang berada di lereng Gunung Poso ini merupakan daerah dengan curah hujan cukup tinggi menjadikan Desa Umpungeng sebagai kawasan resapan air. Sejumlah aliran sungai menjadi pemisah antar dusun satu dengan yang lainnya. Sungai - sungai tersebut mengalir dari kawasan Umpungeng dan bermuara ke sungai Langkemme yang selama ini merupakan irigasi untuk kebutuhan pengairan ribuan hektar sawah di sejumlah daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Sukardi yang menjelaskan sejarah kampung Coppoliang, (Wawancara, 2021) pada masa nenek moyangnya terdapat goa yang bernama liang di daerah tersebut, goa tersebut sebagai tempat persembunyian masyarakat pada masa perang dengan penjajah. Maka masyarakat setempat menyebutnya Kampung Coppoliang. Keberadaan kampung Coppoliang ditandai dengan adanya situs *appatulunge* yaitu tempat pembakaran orang yang meninggal, pada saat itu sebelum penjajahan Belanda masyarakat setempat belum mengenal kuburan. Lalu di kampung tersebut juga terdapat kuburan Arung sanca, dipercaya bahwa kuburan tertua. (Wawancara, 2021)

Pada masa penjajahan, masyarakat membuka lahan lalu menanam pohon kopi di sekeliling sebagai tanda bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Lalu masyarakat menanam pohon kemiri dan pohon aren. Gula aren adalah sumber kehidupan masyarakat, gula tersebut di tukarkan dengan beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sukardi menjelaskan sejarah Kawasan Hutan Laposo Niniconang bahwa, kata Niniconang karena di atas gunung

tersebut terdapat seorang nenek yang bermukim dan karena perjalanan kesana jauh, capek sehingga dikatakan laposo. Pada masa penjajahan, pengukuran dan penunjukan kawasan hutan ditunjuk sejauh mata memandang di atas gunung. Jarak antara Kawasan Hutan Niniconang dan Hutan Laposo berjauhan, laposo berada di Poso sulawesi tengah sedangkan niniconang berada di Coppoliang, Soppeng. Kawasan hutan tersebut tidak dikelola karena Belanda melarangnya, jaraknya jauh dan dikeramatkan oleh masyarakat. Kawasan hutan tersebut berjarak sekitar satu hari perjalanan dari kampung Coppoliang.(Wawancara, 2021)

Setelah Indonesia Merdeka, pada sekitar Tahun 1970 pihak dari Dinas Kehutanan memberi bibit pohon pinus, pohon kemiri dan pohon jati kepada masyarakat. Kemudian, masyarakat setempat diberi upah untuk setiap pohon yang ditanam dan merawat pohon tersebut. Lalu, sekitar tahun 1980 masyarakat Kampung Coppoliang ingin dipindahkan ke Mamuju, lalu masyarakat meminta ganti rugi pada saat itu namun pihak kehutanan tidak mampu membayarnya sehingga masyarakat memilih untuk bertahan. Hasil panen kopi, kemiri, jahe, pangi yang membuat masyarakat memilih bertahan karena hasil tersebut lebih besar walaupun panennya hanya sekali setahun dan produksi gula aren untuk membiayai kehidupan sehari - hari. dan gula aren. Pada tahun 2010 pohon cengkeh yang sudah di tanam masyarakat dicabut oleh pihak kehutanan, sehingga membuat masyarakat mulai berkonflik dengan kehutanan.(Wawancara, 2021)

Saat ini terdapat kurang lebih 30 KK yang bermukim di Coppoliang dan tanah yang dikelola sekitar 1 Ha untuk tiap kepala keluarga. Sukardi baru mengetahui bahwa kebunnya masuk di dalam kawasan hutan pada saat ditangkap tahun 2017 silam.(Wawancara, 2021) Sejak penangkapan tersebut masyarakat kampung Coppoliang takut untuk mengelola kebunnya yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Menurut Sukardi, patok Kawasan Hutan Niniconang pada masa penjajahan saat ini di perluas hingga ke pemukiman masyarakat.

Ale Sewo berada di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Soppeng, Sulawesi Selatan. Berdasarkan wawancara dengan Natu,(Wawancara, 2021) menjelaskan bahwa Sewo merupakan perkampungan tua, dinamakan Sewo karena terdapat sepasang batu besar yang dipercaya dulunya adalah jelmaan Lato Sewo dan Kajao Sewo sebagai orang pertama di kampung. Kampung sewo pernah ditinggalkan karena kesalahpahaman, mereka bertikai dengan orang gantareng. Orang Gantareng pindah ke Masewali, orang Sewo turun ke bawa gunung. Di tempat yang baru, kampungnya diberi nama Ale Sewo. Masyarakat Ale Sewo memulai berkebun sebelum Indonesia Merdeka. Pada masa tersebut masyarakat bercocok tanam dengan cara berpindah-pindah. Kemudian masyarakat menetap untuk berkebun di kampung dan menanam Jagung dan padi gunung. Dua komoditi tersebut untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari.(Wawancara, 2021)

Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat diperintahkan menanam pohon jati dan pohon cendana agar hasilnya dipakai untuk membangun kantor - kantor pemerintahan, kemudian masyarakat mengambil bibit pohon tersebut di kebun milik Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia pada

saat itu menebang semua pohon di dalam perkebunan milik Belanda. Kemudian perkebunan tersebut dijadikan kebun Desa. Lalu di lahan milik masyarakat, mereka menanam pohon jati, pohon kelapa, ubi dan pohon coklat. (Wawancara, 2021)

Pada awal tahun 2019, masyarakat kampung ale sewo dipanggil ke Kantor Kelurahan Bila untuk pendataan TORA Kawasan Hutan, tetapi setelah di Kantor Kelurahan tersebut masyarakat diminta untuk mengikuti Perhutanan Sosial. Maka, masyarakat menolak untuk bertanda tangan pada dokumen usulan tersebut. Semenjak terdapat masyarakat yang ditangkap dan mereka mengetahui bahwa kebunnya masuk kawasan hutan. Masyarakat ale sewo takut ke kebun, jika mendengar suara motor masyarakat akan lari bersembunyi. Namun sekitar 40 KK yang mengelolah kebun yang masuk kawasan hutan tetap mengelolah kebunnya karena kehidupan sehari-harinya bergantung pada kebun tersebut walaupun yang ditanam tidak menjanjikan sebab panennya sekali setahun, cengkeh kadang mati sebelum di panen karena tekstur tanah yang bebatuan. (Wawancara, 2021)

Hukum pertanahan setelah UUPA di Undangkan pada Tahun 1960, dua lembaga hukum nasional yaitu lembaga hukum hak kolektif masyarakat atas tanah dan masyarakat hukum adat, secara otomatis pengaturannya mendasar pada UUPA dan merupakan bagian Sistem Hukum Nasional. Tetapi kedua lembaga hukum tersebut masih tetap diakui eksistensinya dalam produk hukum nasional, walaupun pengaturannya belum jelas. Dalam Pasal 3 UUPA, eksistensi Hak Kolektif Masyarakat Hukum Adat atas Tanah masih diakui sepanjang Masyarakat Hukum Adat sebagai Pemegang hak tersebut masih ada menurut kenyataannya. (Pide, 2007)

UUPA menerangkan bahwa tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Tanah merupakan permukaan bumi, demikian pula tubuh bumi, air serta ruang yang ada di atasnya diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Peraturan Perundang-Undangan. (Wahid, 2008) UUPA yang berisi peraturan dasar yang memuat hal-hal pokok tentang dasar dan arah kebijakan politik agraria nasional, khususnya hubungan manusia dengan tanah. (Erwiningsih, 2009) UUPA Pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional dan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara adalah memberi wewenang kepada Negara untuk: (UUPA, 1960)

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak penguasaan atas tanah merupakan hak untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang serta diberikan kewajiban dan larangan. Larangan tersebut merupakan sesuatu yang membedakan dengan hak penguasaan yang di atur dalam UUPA, seperti hak guna usaha dan hak milik.(Harsono, 2014) Unsur yang harus terpenuhi dalam hak penguasaan atas tanah, yaitu: Pertama, adanya subjek yang menguasai objek tersebut dan Kedua, subjek mempunyai keinginan untuk menggunakan objek tersebut. Oleh sebab itu, hak penguasaan tanah yang diberikan untuk dipertahankan dan dinikmati namun tidak melupakan kewajibannya. Hubungan subjek dengan tanah pada kawasan hutan Laposo Niniconang Watangsoppeng merupakan hubungan penguasaan. Oleh sebab itu, pengakuan untuk melindungi hak atas tanah rakyat pada wilayah kawasan hutan diperlukan bentuk pendaftaran tanah yang akan dilakukan oleh BPN dengan menerbitkan sertifikat sebagai bentuk kepastian hukum hak atas tanah tersebut.

Hak penguasaan tanah yang dihasilkan dengan pendaftaran tanah memiliki manfaat untuk kepentingan privat dan publik. Pertama, pendaftaran tanah yang berfungsi untuk kepentingan privat seperti kelompok, badan hukum dan individu untuk menjamin kepastian hukum atas tanah, oleh sebab itu diterbitkan tanda bukti hak milik berupa sertifikat. Kedua, pendaftaran tanah yang bermanfaat untuk kepentingan publik misalnya dengan pemerintah melakukan inventarisasi sumber-sumber agraria untuk pajak negara dengan maksud untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sertifikat tanah yang dihasilkan melalui pendaftaran tanah merupakan alat bukti yang kuat dengan dimaknai sebagai dokumen formil untuk digunakan sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang diterbitkan oleh BPN. Hal tersebut berarti bahwa data yuridis dan data fisik yang terdapat pada sertifikat mempunyai kepastian hukum sepanjang tidak terdapat alat bukti yang membuktikan sebaliknya.

3. Membahas Konsep Kepemilikan Tanah

Hak milik merupakan hak dasar yang dijamin konstitusi, dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 ayat (4) mengatur bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Sementara itu, UUPA sebagai peraturan dasar hukum tanah nasional mengatur bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda merupakan hubungan yang disebut 'Hak'. Makna dari sebutan tersebut adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang disebut hak milik atas benda tersebut. Kata milik sendiri dalam makna hukum lebih menekankan pada hak dari pada kepada bendanya.(Wahid, 2008,43) Landasan filosofis, politik, ekonomi tentang hak milik pada abad 17 dan 18 berdasarkan teori okupasi (occupation theory), yang menyatakan bahwa hak individu untuk memiliki dan mengalihkan adalah adanya hak alamiah dari individu tersebut. Konsep ini untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke, yang dikenal dengan nama Labour Theory yang berdasarkan hukum alam (Natural Law). John Locke berpendapat bahwa keberadaan milik pribadi sudah ada jauh sebelum adanya negara dan bebas dari hukum yang diatur oleh negara karena hak kepemilikan

adalah hak alamiah atau yang dikenal dengan prinsip keadilan hukum alam.(Wahid, 2008,29)

Berdasarkan pengertian tanah menurut sudut pandang hukum secara umum adalah permukaan bumi yang hak kepemilikannya diakui, hak tersebut bukan hanya bagian permukaan tanah namun seluruh yang ada di atas dan di bawahnya termasuk pepohonan, bangunan dan barang berharga lainnya. Tanah sebagai konsep properti pada dasarnya berkaitan dengan tanah di mana individu atau kelompok yang diakui hak kepemilikan dan penggunaan berkaitan dengan hakikat hak dan tanggung jawab atas tanah tersebut.

Konsepsi hukum agraria nasional tentang kepemilikan tanah menyatakan bahwa, tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah milik bangsa Indonesia, yang menjadi prinsip kesatuan negara republik Indonesia. Oleh sebab itu tanah di Indonesia tidak dijadikan objek penguasaan yang menimbulkan perpecahan bangsa. Unsur Komunal religius sebagai prinsip Negara Kesajahteraan di dalam UUPA yang diartikan bahwa tanah adalah milik bersama sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hak menguasai negara yang merupakan hak tertinggi dalam penguasaan tanah yang menjelaskan bahwa kewenangan Pemerintah untuk mengelola, ruang angkasa, air dan bumi serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penguasaan tanah merupakan dasar untuk pemberian hak atas tanah, sebagaimana dijelaskan dalam PP 24 Pendaftaran tanah pada Pasa 24 yang menyatakan bahwa sekalipun tidak ada alat bukti penguasaan secara yuridis, namun apabila dalam kenyataan bidang tanah tersebut telah dikuasai secara fisik maka dapat diformalkan haknya melalui penetapan/pemberian haknya kepada yang bersangkutan.(Lubis & Lubis, 2008,236) Alas hak merupakan pembuktian penguasaan tanah dengan secara tertulis yang berupa alat bukti yang menerangkan atau menetapkan adanya hubungan hukum antara yang mempunyai tanah dengan tanah maupun secara yuridis berupa bukti riwayat pemilikan tanah dari pejabat berwenang atau pejabat Pemerintah yang menerbitkan alas hak tersebut.(Lubis & Lubis, 2008,237) Alas hak secara yuridis ini dituangkan dalam bentuk tertulis dengan suatu surat keterangan, surat keputusan, surat pengakuan, akta otentik, surat pernyataan, surat dibawah tangan dan lain-lainnya. Secara perdata dengan adanya hubungan tanah dengan yang mempunyai tanah dapat dibuktikan dengan penguasaan fisik secara turun-temurun, maka tanah tersebut telah menjadi miliknya. Fisik tanah yang merupakan kewenangan yuridis dalam penguasaan tanah, oleh karena itu alas hak dalam penguasaan yuridis memberikan hubungan hukum mengenai tanah tersebut. Apabila tanah tersebut telah memiliki alas hak dan telah dikuasi secara turun-temurun untuk selanjutnya diberikan perlindungan hukum berupa menindaklanjuti alas hak yang melandasi hubungan tersebut menjadi hak atas tanah yang ditetapkan oleh BPN sehingga penguasaan tanah oleh pemilik tanah mendapatkan legitimasi dari Pemerintah berupa hak atas tanah.(Lubis & Lubis, 2008,237-238)

4. Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Masyarakat Laposo Niniconang

Setelah diundangkannya UUPA, dualisme hukum Agraria yaitu Hukum Agraria Barat dan Hukum Agraria Adat telah berakhir.(Lubis & Lubis, 2008,237) Hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah merupakan hak ulayat yang bersifat komunal. Hak ulayat tersebut memiliki keistimewaan yang berlaku di dalam wilayah dan di luar wilayah tersebut. Di dalam wilayah berhubungan dengan para anggota masyarakatnya sedangkan kekuatan berlaku di luar wilayah berhubungan dengan yang bukan anggota masyarakat hukum adatnya atau biasa disebut 'orang asing' atau 'orang luar'.(Lubis & Lubis, 2008,181-186)

Hak atas tanah merupakan hak bersama kelompok teritorial. Hak tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bersama. Oleh sebab itu, walaupun penggunaan dan penguasaannya bersifat pribadi terkandung unsur kebersamaan.(Lubis & Lubis, 2008,2) Hak milik dari tanah bersama mengikat pada hak yang bersifat sementara untuk setiap anggota kelompok yang menguasai tanah tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut dapat dilakukan sendiri secara individual atau bersama-sama dengan kelompok masyarakat.

Pada UUPA pasal 20 ayat 1 mengatur tentang hak milik, antara lain adalah Hak milik adat, hak-hak golongan dan hak-hak lainnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 dan Ayat 2 Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.(Gatra et al., 2018) Sedangkan hak ulayat masih tetap dipertahankan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 1 ayat 1 UUPA merupakan sifat komunal sebagai konsepsi hukum tanah nasional karena mengatur seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari bangsa Indonesia dan bersifat kekal seperti hak ulayat pada masyarakat hukum adat. Dengan demikian, hak bangsa Indonesia mengandung dua unsur, yaitu:(Hutagalung & Gunawan, 2008)

- a. Unsur komunal, yaitu kepunyaan bersama akan tetapi bukan berarti hak kepemilikan dalam arti;
- b. Unsur tugas kewenangan yang bersifat publik untuk mengatur penggunaan dan penguasaan tanah yang dipunyai bersama tersebut.

Pasal 1 ayat 2 UUPA tercermin sifat religius pada hukum tanah nasional yang mengatur bahwa seluruh air, bumi, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada wilayah Republik Indonesia sebagai

karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional. Berdasarkan UUPA, maka hak atas tanah dibagi dua kategori:(Bakri, 2011)

- a. Hak atas tanah primer yaitu hak atas tanah yang berasal dari negara yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Hak atas tanah tersebut harus terdaftar dan memiliki sertifikat.
- b. Hak atas tanah sekunder yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh pemegang hak atas tanah lainnya berdasarkan perjanjian kerjasama yang terdiri dari hak sewa, hak usaha bagi hasil, hak gadai dan hak menumpang.

Bagi masyarakat yang membuka lahan dengan ijin aparat Pemerintah Desa pada masa lalu dan mengelola tanah tersebut secara turun-temurun dapat melahirkan bukti kepemilikan hak atas tanah. Penguasaan tanah mengatur tentang kemungkinan penggunaan, jangka waktu dan syarat untuk dapat menggarap tanah. Hal tersebut berkaitan dengan objek dan subjek hak atas tanah dengan memberikan hak dan kewajiban serta larangan bagi pemegang hak atas tanah tersebut untuk. Penguasaan tanah oleh masyarakat Kampung Coppoliang dan Ale Sewo merupakan tanah warisan orang tua yang dipergunakan untuk pertanian dan permukiman.

Konflik kepemilikan tanah antara masyarakat dengan Kehutanan berkaitan dengan hak atas tanah yang berada di kawasan Hutan Laposo Niniconang Watangsoppeng yang bermula sejak ditetapkan sebagai kawasan hutan pada Tahun 2014. Masyarakat yang mengelola tanah tersebut sebelum Indonesia merdeka dan dimanfaatkan secara turun-temurun dan membayar SPPT-PBB terhadap lahan yang ditempatinya. Bukti tersebut adalah bukti fisik yang telah dimiliki oleh masyarakat secara turun-temurun dan menjadi alat bukti hak atas tanah.

Ketentuan yang memperkuat argumen masyarakat tersebut termuat pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ketentuan tersebut ditafsirkan oleh masyarakat desa sekitar hutan tersebut bahwa jika mereka telah menguasai tanah tersebut selama 20 tahun dengan iktikak baik dapat memperoleh hak milik atas tanah yang bersangkutan. Akan tetapi peraturan ini dapat berlaku jika tanah tersebut bukan tanah konflik, sengketa dan berada di kawasan hutan Laposo Niniconang, maka ketentuan tersebut tidak dapat berlaku.

Masyarakat kampung Coppoliang dan Ale Sewo telah tinggal sebelum Indonesia merdeka, secara yuridis dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pada Pasal 2 menyebutkan bahwa pemberian hak atas tanah negara meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Pasal 9 Permen tersebut mengatakan bahwa sebelum mengajukan permohonan hak, terlebih dahulu melengkapi data yuridis dan data fisik. Salah satu data fisik bisa berupa surat girik, pajak PBB P-2, maupun bukti peroleh penggunaan tanah tersebut. Akan tetapi, hal tersebut syarat sertifikasi tanah bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu, redistribusi tanah kawasan hutan

untuk mesti dilakukan untuk kesehjatehraan masyarakat Kampung Coppoliang dan Ale Sewo.

Pengajuan masyarakat untuk retribusi tanah, penataan ulang kawasan hutan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkadilang dengan penataan aset dan akses untuk kemakmuran rakyat melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, Pasal Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Tanah Objek Reforma Agraria adalah tanah yang dikuasai oleh negara yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. Akan tetapi, kawasan hutan yang tidak dilepaskan oleh Menteri Kehutanan tidak dapat diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan. Namun, masyarakat tetap berjuang untuk dapat menguasai tanah tersebut menjadi hak milik atas tanah karena masyarakat telah menempatkannya selama bertahun-tahun dan tanah tersebut merupakan warisan nenek moyangnya. Tujuan utama Landreform untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi rakyat dan produktivitas nasional terkhusus pada sektor pertanian. Hal tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat di Kampung Coppoliang dan Ale Sewo yang sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani. Salah satu implikasi yang akan dirasakan oleh petani tersebut dalam model masyarakat yang serupa adalah meningkatnya produktifitas hasil pertanian dengan adanya jaminan hak terkait kepemilikan tanah pada kawasan hutan. (Khadijah & Aswari, 2019)

SIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat setempat yang telah hidup secara turun – temurun sebelum Indonesia merdeka mengkhawatirkan akan ditangkap karena mengelola lahan di dalam Kawasan Hutan Laposo Niniconang, akibat banyaknya petani yang ditangkap. Berkaca pada situasi agraria, Negara Indonesia membutuhkan kebijakan reforma agraria yang komprehensif untuk penyelesaian konflik kawasan hutan. Reforma agraria haruslah menjadi pondasi pembangunan Indonesia kedepan, untuk menghadapi tantangan politik agraria ke depan yang berpotensi menghilangkan hak rakyat atas tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan Pemerintah untuk menginisiasi penyusunan naskah rancangan Undang – Undang tentang Pembaruan Agraria sebagai mandat yang belum terealisasi sejak TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta mengevaluasi atau merevisi peraturan yang tumpang tindih untuk memperoleh kesamaan pandangan terhadap upaya penyelesaian konflik kawasan hutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anugrah, M. B. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Pada Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Wns)*. Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.
- Anugrah, M. B. (2020). *Hentikan Kriminalisasi Petani di Kawasan Hutan (Studi kasus dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan (M. B. Anugrah (ed.))*. Guepedia.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ZaIREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=penegakan+hukumdi+perairan+indonesia+berbasis+nilai+keadilan&ots=tHwL6VNSrc&sig=ntjSwJCKk1h5_uYvC81u11Ql4w4

- Bakri, M. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi)*. Universitas Brawijaya Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=bpGZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sistem+Hukum+Indonesia&ots=XqXLd8iFwS&sig=6NTM1bWJ2iM1dbvzOsg26bfk_LM&redir_esc=y#v=onepage&q=Sistem Hukum Indonesia&f=false
- BPKH. (2020). *Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar*. BPKH Makassar. <https://id575127-balai-pemantapan-kawasan-hutan-bpkh-wilayah-vii-maka.contact.page/#gsc.tab=0>
- Erwiningsih, W. (2009). Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(Special Issue), 118–136. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3880>
- Gatra, D., Pasamai, S., Kadir, H., Buana, A. P., & Aswari, A. (2018). Stagnancy of Land Use Arrangement Former Cultivation Rights (Case Study of BPN Makassar). *Substantive Justice International Journal of Law*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i1.14>
- Harsono, B. (2014). *Hukum Agraria Indonesia*. Usakti. http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/1/BDS/1996/000000000000000084391/0
- Hutagalung, A. S., & Gunawan, M. (2008). *Kewenangan Pemerintah Dibidang Pertanahan*. Rajawali Pers.
- Kartodihardjo, H. (2013). *Kembali Ke Jalan Lurus, Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*. Nailil Printika.
- Khadijah, H. N., & Aswari, A. (2019). Ammatoa's Inheritance Law System. *Indonesia Prime*, 4(1), 24–34. <https://www.indonesiaprime.or.id/index.php/id/article/view/66>
- Kpai.go.id. (2020). *Data KPA Sulawesi Selatan 2020*. Kpa.Go.Id. http://kpa.or.id/media/baca/liputan_khusus/557/Konflik_Agraria_di_Balik_Projek_Strategis_Nasional_/
- Lubis, M. Y., & Lubis, A. R. (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Mandar Maju. Bandung.
- Permadi, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani. *Arena Hukum*, 9(2), 225–250. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.5>
- Pide, A. S. M. (2007). *Dilema Hak Kolektif Eksistensi & Realitas Sosialnya Pasca-UUPA*. Pelita Pustaka.
- Safiuddin, S. (2018). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumuhai. *Mimbar Hukum*, 30(1), 63–77. <https://doi.org/doi.org/10.22146/jmh.16681>
- Situmorang, R. O. P., & Simanjuntak, E. R. (2015). Kearifan Lokal Pengelolaan

- Hutan oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Wisata Alam Sicike-cike Sumatera Utara. *Jurnal Widyaiset*, 18(1), 309–322. <https://media.neliti.com/media/publications/29125-ID-analisis-tenurial-dalam-pengembangan-kesatuan-pengelolaan-hutan-kph-studi-kasus.pdf>
- Supriadi, B. E. (2014). *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sylviani, S., & Hakim, I. (2014). Analisis Tenurial Dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph): Studi Kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 29125. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2014.11.4.14>
- Triansyah, W., Risma, A., & Aswari, A. (2020). Alih Fungsi Lahan Sawah Tanah Redistribusi yang Diberikan Pemerintah. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–26. <https://www.jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/47>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Pub. L. No. 2043, 1-29
- Wahanisa, R. (2015). Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). *Ustisia Jurnal Hukum*, 4(2), 416–438. <https://doi.org/doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8660>
- Wahid, M. (2008). *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisa dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*. Penerbit Republika.
- Wicaksono, M. T., & Malik, M. (2018). Konteks Politik Hukum di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat: Catatan Ke Arah Transisi 2019. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 25–46. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.60>